



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NEILMALDRIN NOOR
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 118037

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.803.606.666

1. Tanah Seluas 6220 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 4.876.480.000
2. Tanah Seluas 3358 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, WARISAN Rp. 279.833.333
3. Tanah Seluas 12817 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, WARISAN Rp. 1.068.083.333
4. Tanah dan Bangunan Seluas 382 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.579.210.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 881.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, MERC BENZ C 200 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOBIL, TOYOTA STARLET Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 425.675.900**D. SURAT BERHARGA** Rp. 52.990.750**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.974.958.091



F. HARTA LAINNYA	Rp.	516.005.920
Sub Total	Rp.	12.654.237.327
III. HUTANG	Rp.	117.759.268
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	12.536.478.059

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.